

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud adalah konsep pelanggaran yang mempunyai sudut pandang yang luas. ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) adalah organisasi *anti-fraud* terbesar di dunia dan sebagai penyedia utama pendidikan dan pelatihan *anti-fraud*. ACFE mengartikan kecurangan sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas maupun pihak lain. Kecurangan adalah situasi istilah yang umum dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan sebagai kekhianatan tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah (Zimbelman dkk, 2014:7).

ACFE mengklasifikasikan kecurangan itu ke dalam tiga kategori, yaitu : (1) Kecurangan asset, berupa pencurian atau penyalahgunaan asset; (2) Kecurangan dalam laporan keuangan atau pernyataan palsu, meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan; (3) Korupsi, yaitu para pelaku kecurangan menggunakan pengaruhnya secara tidak sah dalam transaksi bisnis untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan pribadi atau orang lain. Jenis kecurangan ini banyak terjadi di sektor pemerintah. Kecurangan dalam bentuk korupsi ini sulit untuk dideteksi karena dilakukan oleh beberapa orang yang bekerjasama dalam melakukan kecurangan tersebut.

Menurut ACFE, korupsi terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu: pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemasaran (*economic extortion*). Jenis kecurangan atau fraud yang terjadi di setiap negara ada kemungkinan berbeda, hal ini dikarenakan praktek fraud sangat dipengaruhi oleh kondisi hukum di negara yang bersangkutan. Di negara maju dimana penegakkan hukum sudah berjalan dengan baik dan kondisi ekonomi masyarakat secara umum cukup mantap maka praktek fraud lebih modus operasinya.

Setiap pemerintah di dunia, termasuk Indonesia selalu mempunyai tujuan untuk mengembangkan perekonomiannya agar taraf hidup bangsa dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi di desa yang memiliki peranan dalam perkembangan perdagangan di desa pekraman Provinsi Bali. Pemerdayaan masyarakat desa demi meningkatnya perekonomian menjadi masalah penting saat ini dan selain itu fungsi strategis dari adanya LPD dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat harus diikuti dengan peningkatan peran serta masyarakat dibantu oleh pemerintah setempat (Suartana, 2009:4).

Pemerdayaan perekonomian masyarakat desa adat melalui pemberian kredit dalam rangka membuka akses untuk menciptakan peluang usaha adalah tanggung jawab Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dalam penyaluran kredit tersebut pengurus LPD harus memperhatikan aspek manajemen dalam pelaksanaannya. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang sangat penting. Dalam pengawasan ini diperlukan pengendalian, alat kendali tersebut adalah struktur pengendalian internal.

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa tidak lepas dari peranan pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi tersebut terdiri dari masyarakat, konsumen, produsen, pemerintah, lembaga keuangan, dan sector luar negeri. Salah satu lembaga keuangan yang berada di Bali merupakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Pembentukan LPD di Bali berasal dari seminar kredit pedesaan yang diselenggarakan di kota Semarang pada tanggal 20-24 Februari 1983. Hasil daripada seminar yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran suatu LPD dipandang sangat tepat guna menjangkau masyarakat kecil atau tidak mampu di pedesaan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan tersebut.

Produktivitas pengurus LPD harus senantiasa ditingkatkan agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain. Penyehatan dan penyempurnaan sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen harus selalu mengembangkan dan meningkatkan berbagai macam kebijakan dan strategi yang dimilikinya agar tujuan perusahaan dapat dicapai. Struktur pengendalian internal merupakan suatu jasa untuk untuk mengevaluasi dan melaporkan kecukupan pengawasan internal guna memberikan kontribusi yang sesuai, ekonomis, efisien dan penggunaan sumber daya dengan efektif (*Davies, 2001:79*).

Namun seketat apapun pengawasan yang dilakukan, masih ada saja kecurangan yang bisa dilakukan oleh pihak internal dalam Lembaga Keuangan salah satunya LPD. Dalam LPD manajemen atau pengurus LPD tersebut sudah menetapkan suatu standar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tetapi fakta yang terjadi manajemen tidak menjalankan standar operasional tersebut. Padahal dengan adanya SOP setiap karyawan yang melakukan suatu pekerjaannya akan memiliki petunjuk atau acuan sehingga pekerjaan tersebut hasilnya selalu konsisten.

Banyaknya kasus mengenai kecurangan akuntansi yang terjadi di sejumlah LPD di Bali menandakan bahwa tindakan kecurangan masih terbilang tinggi. Banyak cara-cara kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal LPD untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Seperti dengan cara membuat deposito fiktif atas nama pribadi, membuat kredit fiktif atas nama orang lain, memakai dana nasabah secara diam-diam, memakai jaminan nasabah untuk dianggunkan ke LPD lain tanpa sepengetahuan pemilik, dan memberikan kredit sampai ke luar desa. Sehingga sampai saat ini banyak LPD tercatat tidak sehat dan terancam pailit karena salah kelola, bahkan ada pengurus LPD yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Berikut data LPD macet di Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2019 dan data Kesehatan LPD di Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Tabel 1.1

Data LPD macet di Kabupaten Buleleng 2018-2019

NO	KECAMATAN	2018	2019
1.	Kec. Busung Biu	6 LPD	6 LPD
2.	Kec. Banjar	5 LPD	7 LPD
3.	Kec. Buleleng	5 LPD	-
4.	Kec. Sukasada	3 LPD	-
5.	Kec. Kubutambahan	3 LPD	-
6.	Kec. Seririt	-	2 LPD
7.	Kec. Tejakula	-	1 LPD

Sumber : Nusa.com (2018), Website resmi pemerintah Kab. Buleleng (2019)

Tabel 1.2

Data Kesehatan LPD di Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah LPD	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet	Tidak Laport
1.	Gerokgak	14	6	3	3	2	-	-
2.	Seririt	25	9	7	2	3	4	-

3.	Busungbiu	16	5	3	3	-	5	-
4.	Banjar	17	6	1	3	1	6	-
5.	Sukasada	21	16	3	-	1	1	-
6.	Buleleng	21	9	3	3	2	3	1
7.	Sawan	18	11	4	2	-	1	-
8.	Kubutambahan	22	10	6	1	2	2	1
9.	Tejakula	15	12	1	2	-	-	-

Sumber : website resmi pemerintah Kabupaten Buleleng

Tidak dapat dipungkiri banyak LPD di Kabupaten Buleleng yang melakukan kecurangan (*fraud*). LPD bermasalah di Kabupaten Buleleng salah satunya yaitu LPD yang berada di Kecamatan Tejakula. Pada tahun 2020 keuntungan yang diperoleh LPD Desa Pekraman Bondalem mengalami penuruan drastis. Dalam hal ini salah satu karyawan melakukan tindakan pemalsuan kredit, yaitu seorang karyawan memberikan pinjaman pada nasabah dengan menggunakan uang pribadi namun menggunakan kartu kredit LPD dan bunga pinjaman sesuai yang berlaku di LPD. sehingga laba bunga yang seharusnya didapatkan LPD menjadi menurun. Kecolongan yang terjadi ini sangat merugikan LPD yang sempat mengalami penurunan keuntungan. Hal ini terjadi karena karyawan yang bertugas di tabungan melakukan tindak kecurangan. kecurangan terjadi karena kurangnya pengawasan sehingga ketika ada kesempatan, mereka akan melakukan tindak kecurangan tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi setelahnya. Selain LPD Bondalem, kasus kecurangan juga terjadi di LPD Gretek. Ketua LPD Gretek telah melakukan penyalahgunaan wewenangnya menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi.

Dimana ketua LPD tersebut meminjamkan kredit di LPD menggunakan nama peminjam palsu atau fiktif.

Dari kasus kecurangan yang terjadi pada beberapa LPD di Kecamatan Tejakula yang menandakan bahwa kasus kecurangan akuntansi saat ini masih tinggi. Berbagai cara yang dilakukan pihak – pihak internal LPD untuk dapat memenuhi kepuasan kebutuhan dengan melakukan tindak kecurangan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud, yang pertama adalah tekanan pihak internal. Tekanan pihak internal disini adalah target keuangan yang ditetapkan oleh perusahaan kepada manajemen untuk bisa mencapainya. *COSO Fraud Study 2010* menemukan bahwa salah satu motivasi untuk melakukan kecurangan adalah untuk memenuhi target keuangan internal. Target keuangan internal yang dipatok kepada manajemen membuat mereka termotivasi untuk melakukan kecurangan ketika target keuangan tersebut berkaitan dengan perjanjian kompensasi atau bonus plan (Perols dan Lougee,2010). Salah satu target keuangan internal yang dituntut oleh perusahaan adalah peningkatan profitabilitas sebagai indicator kinerja keuangan manajemen. Tekanan berpengaruh terhadap tindak kecurangan (fraud).

Selain tekanan, faktor lain yang berpengaruh adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmania (2015), adanya peluang memungkinkan terjadinya kecurangan. Peluang tercipta karena adanya kelemahan pengendalian internal, ketidakefektifan pengawasan manajemen, atau penyalahgunaan posisi atau otoritas. Kegagalan untuk menetapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi aktivitas kecurangan juga meningkatkan peluang terjadinya kecurangan. Dari tiga faktor risiko kecurangan (*pressure, opportunity, dan rationalization*), peluang merupakan hal dasar

yang dapat terjadi kapan saja sehingga memerlukan pengawasan dari struktur organisasi mulai dari atas. Kesempatan berpengaruh terhadap tindak kecurangan.

Rasionalisasi adalah komponen penting dalam banyak kecurangan. Rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur (Skousen et al., 2009). Variabel ini dapat diproksikan dengan auditor change. Menurut Beneish dkk.(2015) total akrual merupakan salah satu variabel untuk menilai profitabilitas manipulasi. Penelitian Skousen dkk. (2019), menunjukkan bahwa total akrual tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*. Kualitas audit diperlukan dalam mendeteksi *financial statement fraud*. Hal ini dikarenakan laporan keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh pihak internal dan eksternal. Oleh karena itu perlu dilakukan pengauditan oleh auditor eksternal.

Kesesuaian kompensasi merupakan kecocokan dan kepuasan karyawan/ pegawai/ pekerja atas apa yang diberikan instansi kepada mereka baik berupa upah perjam maupun gaji secara periodik sebagai balasan dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Menurut Thoyibatun (2009) dalam penelitiannya sehubungan dengan kesesuaian kompensasi bahwa organisasi perlu mendesain sistem kompensasi yang mempertimbangkan tujuan karyawan untuk memberikan kinerja terbaiknya pada organisasi. Organisasi memberikan kompensasi yang sesuai untuk menghindari adanya keinginan untuk menambah penghasilan lain. Dengan demikian keinginan untuk melakukan tindak kecurangan dapat dikurangi. Dalam entitas pemerintahan kompensasi seseorang telah ditentukan berdasarkan lama kerja dan golongan. Adapun mereka yang bekerja dibidang keuangan akan mendapatkan imbalan yang merupakan penghargaan atas tanggung jawab pekerjaan yang mereka emban. Namun semakin

tinggi imbalan yang mereka peroleh, kebutuhan, tuntutan, dan gaya hidup akan semakin tinggi. Dengan demikian individu tersebut akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan imbalan yang lebih dan lebih untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan, dan gaya hidup yang dijalankan sehingga kecenderungan bagi mereka yang bekerja di bidang keuangan sangat memungkinkan untuk melakukan tindak kecurangan. Kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap tindak kecurangan.

Kepuasan kerja merupakan ukuran dari tingkat kepuasan pekerja dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh dan menyukai pekerjaan yang ditekuninya. Kepuasan kerja sangat berpengaruh untuk berjalannya kegiatan operasi sebuah instansi/perusahaan. Kepuasan kerja karyawan perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap proses kegiatan perusahaan. Menurut Sadewo dan Joko (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu dengan memberikan pekerjaan yang secara mental menantang dan dilakukan menggunakan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, kemudian atasan memberikan sifat adil atas upah yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan tingkat pekerjaannya, kondisi kerja yang mendukung untuk mengerjakan tugas dengan baik, rekan kerja yang ramah dan kesesuaian pekerjaan yang diperoleh. Hasil penelitian Putri (2014) dan Julya (2015) menemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh pada tindak kecurangan. Hipotesisnya kepuasan kerja berpengaruh negative terhadap tindak kecurangan.

Tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya tergantung pada peralatan modern, sarana dan prasarana lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawannya. Setiap organisasi maupun perusahaan

akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan tujuan bisa tercapai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Fraud Triangle*, Kesesuaian Kompensasi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Tindakan Kecurangan (Fraud) (Studi Pada LPD Di Kecamatan Tejakula)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan yaitu :

- 1) Apakah tekanan berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kecamatan Tejakula ?
- 2) Apakah kesempatan berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kecamatan Tejakula ?
- 3) Apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kecamatan Tejakula ?
- 4) Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kecamatan Tejakula ?
- 5) Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap tindak kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kecamatan Tejakula ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah diatas adalah :

- 1) Untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari variabel tekanan terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kecamatan Tejakula
- 2) Untuk menguji dan mengetahui pengaruh variabel kesempatan terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kecamatan Tejakula
- 3) Untuk menguji dan mengetahui pengaruh variabel rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kecamatan Tejakula
- 4) Untuk menguji dan mengetahui pengaruh variabel kesesuaian kompensasi terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kecamatan Tejakula
- 5) Untuk menguji dan mengetahui pengaruh variabel kepuasan kerja terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kecamatan Tejakula

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan teori khususnya dalam bidang *auditing* karena pada penelitian ini mencakup teori-teori yang telah dikembangkan, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap ilmu *auditing*.

- 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu dalam pemberian masukan atau saran bagi pihak-pihak internal dan para karyawan dalam mendeteksi adanya tindak kecurangan, sehingga dapat dengan cepat mengambil tindakan yang tepat untuk menanggulangi atau mengantisipasi hal tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai sebuah kontrak di mana satu atau lebih pemegang saham (*principal*) melibatkan manajemen (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka. Manajemen adalah pihak yang dikontrak oleh pemegang saham bekerja demi kepentingan pemegang saham dan agen agar bertindak yang terbaik bagi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu manajer harus bertanggung jawab kepada pemegang saham.

Menurut *Eisenhardt (1989)* teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu : (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri, (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang, dan (3) manusia selalu menghindari risiko. Ketiga hal tersebut menyebabkan informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan realibilitasnya. Informasi yang disampaikan biasanya tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau disebut sebagai informasi yang tidak simetri. Ketidakjelasan informasi yang dihasilkan manajemen pada akhirnya akan menyesatkan para pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi. Dengan teori akuntansi positif, pembuat kebijakan bisa memprediksi konsekuensi ekonomis dari berbagai kebijakan dan praktek akuntansi. Teori akuntansi

positif berusaha menguraikan apa dan bagaimana praktek akuntansi dilakukan berdasarkan pengalaman yang dapat diuji secara empiris. Teori akuntansi positif juga menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Teori akuntansi positif dapat memberikan pedoman bagi para pembuat kebijakan akuntansi dalam menentukan konsekuensi dari kebijakan tersebut.

Harafap (2011) menjelaskan bahwa metode teori akuntansi positif diawali dari suatu teori atau model ilmiah yang sedang berlaku atau diterima umum. Berdasarkan teori ini maka dirumuskan masalah penelitian untuk mengamati perilaku atau fenomena nyata yang tidak ada dalam teori. Kemudian dikembangkan teori untuk menjelaskan fenomena tadi dan dilakukan penelitian secara terstruktur dan peraturan yang standar dengan melakukan perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengumpulan data. Sehingga diketahui apakah hipotesis yang dirumuskan diterima atau tidak.

Hipotesa teori akuntansi positif

Watts dan Zimmerman [1990] mengemukakan 3 Hipotesa dari teori akuntansi positif.

1. Hipotesis rencana bonus (*The bonus plan hypothesis*)

Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahan keuntungan yang dilaporkan dari periode dimasa depan ke periode saat ini.

Hipotesis ini cukup beralasan, seorang manajer tentu ingin mendapatkan imbalan yang tinggi. Apabila besaran bonus tersebut tergantung pada besar

kecilnya laba perusahaan, maka seorang manajer atau siapapun itu tentu akan berusaha memberikan laporan pendapatan bersih setinggi mungkin agar mendapatkan bonus yang tinggi.

Salah satu caranya adalah dengan memilih dan menentukan kebijakan akuntansi yang bisa meningkatkan laba pada laporan keuangan periode tersebut. Sesuai dengan karakter proses akrual, hal tersebut bisa menyebabkan penurunan laba perusahaan yang akan dilaporkan pada masa yang akan datang dengan faktor lainnya yang masih tetap sama.

2. Hipotesis kontrak hutang (*Debt covenant hypothesis*)

Hipotesis kontrak hutang ini seluruh hal yang lain dalam keadaan tetap. Semakin dekat sebuah perusahaan terhadap pelanggaran prinsip akuntansi yang didasari atas sebuah kesepakatan hutang.

Maka ada kecenderungan semakin besar kemungkinan manajemen perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang melaporkan perubahan laba dari periode masa depan ke periode saat ini.

3. Hipotesis biaya politik (*The political cost hypothesis*)

Semakin besar ongkos politik yang ditanggung oleh perusahaan, maka manajer akan cenderung untuk menggunakan prosedur akuntansi yang menyerah terhadap laba yang dilaporkan pada masa saat ini menuju masa mendatang. Dalam pemilihan kebijakan akuntansi dipengaruhi juga oleh dimensi politik perusahaan.

2.1.3 Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi (*Fraud Triangle*)

Fraud Triangle adalah sebuah teori yang ditemukan oleh Donald R. Cressey pada tahun 2007 setelah melakukan penelitian untuk tesis doktornya. Cressey (2007) mengungkapkan hipotesis mengenai *fraud triangle* untuk menjelaskan penyebab melakukan fraud. Berdasarkan penelitian yang telah Cressey (2007) lakukan, ia menemukan bahwa seseorang melakukan fraud ketika mereka memiliki non-sharatie problems. Mereka yakin masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/pekerjaan yang mereka miliki saat ini dan mengubah pola pikir dari konsep mereka miliki saat ini dan raengubah pola pikir dari koisep mereka sebagai orang yang dipercayai meemgang aset menjadi seseorang yang dapat menggunakan aset yang teiah dipercayakan secara pribadi. Cressey (2007) juga menambah bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang illegal, tetapi mereka berusaha nemunculkan pemilikan bahwa apa yang dilakukan merupakan tindakan yang wajar.

Ketiga sifat tersebut menyebabkan informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan informasi yang disampaikan biasanya diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau lebih dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau *asymmetric information* (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Hal tersebut memberikan kesempatan atau opportunity kepada manajer untuk melakukan manajemen laba. Ketidakjelasan informasi yang dihasilkan manajemen pada akhirnya akan menyesatkan para penggura laporan dalam proses pengambilan keputusan. Semakin tingginya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*), mendorong tindakan manajemen laba oleh manajemen. Pada akhirnya, hal itu akan memicu semakin tingginya biaya keagenan (*agency*

cost) dan menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Tindakan manajemen laba yang dilakukan manajemen akibat adanya *conflict of interest dan asymmetric information* dengan pemilik merupakan salah satu bentuk *financial statement fraud*. Pernyataan tersebut sejalan dengan Rezaee (2002) yang menyatakan bahwa tindakan manajemen laba berkaitan erat dengan *financial statement fraud*. Tindakan manajemen laba dilakukan manajemen jika dibiarkan dan tidak diketahui oleh pemilik, pada akhirnya akan berkembang menjadi suatu *financial statement fraud* yang menyesatkan secara material. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya *agency problem* antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) dapat menyebabkan terjadinya *financial statement fraud* yang menyesatkan dan merugikan.

Hasil penelitian tersebut dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Cressey (2007) melakukan wawancara kepada para pelaku kecurangan yang telah menyandang status sebagai narapidana. Ia mewawancarai sekitar 200 narapidana yang berada di penjara. Salah satu kesimpulan pokok yang diperoleh dari wawancara tersebut adalah terjadinya suatu kecurangan dipengaruhi oleh tiga hal: (1) adanya tekanan/dorongan (*pressure/motivation*); (2) adanya peluang/kesempatan (*opportunity*) dan pengetahuan (*knowledge*) untuk melakukan kejahatan dan (3) rasionalisasi/ pembenaran (menyangkut etika dan akhlak dari yang bersangkutan). Adanya peluang memungkinkan terjadinya kecurangan. Peluang tercipta karena adanya kelemahan pengendalian internal, ketidakefektifan pengawasan manajemen, atau penyalahgunaan posisi atau otoritas. Kegagalan untuk menetapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi aktivitas kecurangan juga meningkatkan peluang

terjadinya kecurangan. Dari tiga faktor risiko kecurangan (*pressure, opportunity dan rationalizator*), peluang merupakan hal dasar yang dapat terjadi kapan saja sehingga memerlukan pengawasan dari struktur organisasi mulai dari atas. Organisasi harus membangun adanya proses, prosedur dan pengendalian yang bermanfaat dan menempatkan karyawan dalam posisi tertentu agar mereka tidak dapat melakukan kecurangan dan efektif dalam mendeteksi kecurangan. Peluang pada *financial statement fraud* dapat terjadi pada tiga kategori kondisi. Kondisi tersebut adalah *nature of industry, ineffective monitoring, dan organizational structure*.

Rasionalisasi adalah komponen penting dalam banyak kecurangan(*fraud*) Rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari fraud triangle yang paling sulit diukur (*Skousen et al, 2009*). Menurut SAS (*Statement on Auditing Standards*)No.99 rasionalisasi pada perusahaan dapat diukur dengan siklus pergantian auditor, opini audit yang didapat perusahaan tersebut serta keadaan total akrual dibagi dengan total aktiva. Berikut ini disajikan ringkasan kategori, defirisi dan contoh fraud risk factor berdasarkan fraud triangle theor, oleh *Cressey, (2007)* yang diadopsi dalam SAS No.99 dan berkaitan dengan *financial statement fraud*.

2.1.4 Kecurangan

Kecurangan, secara harfiah fraud didefinisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas. *Black's Law Dictionary* menguraikan pengertian fraud mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang salah atau pemaksaan kebenaran dan

mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Sedangkan dalam *Arens (2008:430)* kecurangan didefinisikan sebagai setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksud untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan kecurangan (fraud) sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau pihak lain. ACFE mengklasifikasikan kecurangan (fraud) dalam beberapa klasifikasi dan dikenal dengan istilah "*Fraud Tree*" yaitu sistem klasifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan yang sama (*uniform occupational fraud classification system*) membagi fraud menjadi 3 jenis sebagai berikut:

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)
2. Kecurangan laporan keuangan atau Pernyataan palsu (*Fraudulent Statement*)
3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Anwar, 2006:10). Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi.

Definisi *Financial Statement Fraud*

Definisi *financial statement fraud* menurut *American Institute Certified Public Accountant* (1998) adalah tindakan yang disengaja atau kelalaian yang berakibat pada salah saji material yang menyesatkan laporan keuangan. Selain itu, menurut *Australian Auditing Standards (AAS)*, *financial statement fraud* merupakan suatu kelalaian maupun penyalahsajian yang disengaja dalam jumlah tertentu atau pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk menipu para pengguna laporan keuangan (*Brendan McGrath, 2007*). Kedua sumber di atas mendefinisikan *financial statement fraud* dengan sudut pandang yang sama.

Elliott and Willingham (2002), mendefinisikan *financial statement fraud* dari sudut pandang yang berbeda. Menurutny, *financial statement fraud* merupakan suatu *management fraud* yaitu, "*the deliberate fraud committed by management that injures investors and creditors through materially misleading*". Dengan demikian, istilah *management fraud* dan *financial statement fraud* sering digunakan secara bergantian, namun secara umum *fraud* adalah tindakan yang disengaja untuk merugikan pihak lain.

Pelaporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan dapat mengakibatkan turunnya integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai pihak. Selain investor dan kreditor, auditor adalah salah satu korban *financial statement fraud* karena mereka mungkin menderita kerugian keuangan dan/atau kehilangan reputasi (*Rezaee, 2002*). Oleh karenanya, auditor harus memahami cara-cara yang ditempuh pihak tertentu dalam melakukan praktik *financial statement fraud*. Menurut SAS No.99, *financial statement fraud* dapat dilakukan dengan:

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi, dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun.

2. Kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan.
3. Melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Pelaku *Financial Statement Fraud*

Financial statement fraud dilakukan oleh siapa saja pada level apa pun, siapa pun yang memiliki kesempatan. Terdapat dua kelompok utama pelaku *financial statement fraud* (Nguyen, 2008). Urutan keterlibatan pelaku dijelaskan sebagai berikut:

Senior manajemen (CEO, CFO, dan lain-lain). CEO terlibat fraud pada tingkat 72%, sedangkan CFO pada tingkat 43%. Karyawan tingkat menengah dan tingkat rendah. Karyawan ini bertanggung jawab pada anak perusahaan, divisi, atau unit lain dan mereka dapat melakukan kecurangan pada laporan keuangan untuk melindungi kinerja mereka yang buruk atau untuk mendapatkan bonus berdasarkan hasil kinerja yang lebih tinggi (Wells, 2005).

2.1.5 Kepuasan Kerja

Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan.

Menurut *Kreitner dan Kinicki (2001;271)* kepuasan kerja adalah “suatu efektifitas atau respons emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan”. *Davis dan*

Newstrom (1985;105) mendeskripsikan “kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka”.

Menurut *Robbins (2003;78)* kepuasan kerja adalah “sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima”.

Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. Kepuasan Kerja merupakan sikap (positif) tenaga kerja terhadap pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu pekerjaannya, penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. Karyawan yang puas lebih menyukai situasi kerjanya daripada tidak menyukainya.

Perasaan-perasaan yang berhubungan dengan kepuasan dan ketidakpuasan kerja cenderung mencerminkan penaksiran dari tenaga kerja tentang pengalaman-pengalaman kerja pada waktu sekarang dan lampau daripada harapan-harapan untuk masa depan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat dua unsur penting dalam kepuasan kerja, yaitu nilai-nilai pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan dasar.

Nilai-nilai pekerjaan merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan tugas pekerjaan. Yang ingin dicapai ialah nilai-nilai pekerjaan yang dianggap penting oleh individu. Dikatakan selanjutnya bahwa nilai-nilai pekerjaan harus sesuai atau membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan hasil dari tenaga kerja yang berkaitan dengan motivasi kerja.

Kepuasan kerja secara keseluruhan bagi seorang individu adalah jumlah dari kepuasan kerja (dari setiap aspek pekerjaan) dikalikan dengan derajat pentingnya aspek pekerjaan bagi individu. Seorang individu akan merasa puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya merupakan sesuatu yang bersifat pribadi, yaitu tergantung bagaimana ia mempersepsikan adanya kesesuaian atau pertentangan antara keinginan-keinginannya dengan hasil keluarannya (yang didapatnya).

Sehingga dapat disimpulkan pengertian kepuasan kerja adalah sikap yang positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan.

Teori kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat sebagian orang lebih puas terhadap suatu pekerjaan daripada beberapa lainnya. Teori ini juga mencari landasan tentang proses perasaan orang terhadap kepuasan kerja. Ada beberapa teori tentang kepuasan kerja yaitu :

1) Two Factor Theory

Teori ini menganjurkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda yaitu *motivators* dan *hygiene factors*. Ketidakpuasan dihubungkan dengan kondisi disekitar pekerjaan (seperti kondisi kerja, upah, keamanan, kualitas pengawasan dan hubungan dengan orang lain) dan bukan dengan pekerjaan itu sendiri. Karena faktor mencegah reaksi negatif dinamakan sebagai *hygiene* atau *maintenance factors*. Sebaliknya kepuasan ditarik dari faktor yang terkait dengan pekerjaan itu

sendiri atau hasil langsung daripadanya seperti sifat pekerjaan, prestasi dalam pekerjaan, peluang promosi dan kesempatan untuk pengembangan diri dan pengakuan. Karena faktor ini berkaitan dengan tingkat kepuasan kerja tinggi dinamakan *motivators*.

2) Value Theory

Menurut teori ini kepuasan kerja terjadi pada tingkatan dimana hasil pekerjaan diterima individu seperti diharapkan. Semakin banyak orang menerima hasil, akan semakin puas dan sebaliknya. Kunci menuju kepuasan pada teori ini adalah perbedaan antara aspek pekerjaan yang dimiliki dengan yang diinginkan seseorang. Semakin besar perbedaan, semakin rendah kepuasan orang.

2.1.6 Kesesuaian Kompensasi

Kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, dan tunjangan kesehatan, hari raya, uang makan, dll. (Hariandja, 2002)

Tujuan pemberian kompensasi adalah sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. (Hasibuan, 2002)

Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan perusahaan, serikat buruh/organisasi karyawan, produktivitas kerja karyawan, pemerintah dengan undang-undang dan keppresnya.

2.1.7LPD

Pengertian LPD menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Oerkreditan Desa, LPD merupakan salah satu unsur kelembagaan Desa Pakraman yang menjalankan fungsi keuangan Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangan desa. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan desa itu sendiri. Lembaga Perkreditan Desa telah berkembang dengan pesat dan telah memberi manfaat yang sangat luas bagi LPD dan anggota anggotanya. Seiring dengan itu telah timbul berbagai kebutuhan baru berkenaan dengan eksistensi kelembagaan, unsur – unsur manajemen, kegiatan dan operasionalnya. Sehingga dibutuhkan pengaturan yang lebih akurat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi keberadaan dan kegiatan LPD. Kekurang hati-hatian dalam mengelola LPD dapat berakibat buruk terhadap kepercayaan masyarakat kepada LPD. Tujuan LPD termasuk dalam fungsinya sebagai salah satu catatan lembaga kemasyarakatan yaitu untuk menjaga ketahanan ekonomi krama desa adat dan mendorong pembangunan desa adat melalui kegiatan tabungan yang teratur, terarah dan penyaluran modal yang produktif, untuk memberantas praktek-praktek ekonomi yang kurang baik dan kurang mendidik seperti gadai gelap, ijon, dan lain lain untuk memberikan dorongan bagi usaha-usnia kecil, rumah tangga serta kesempatan berusaha bagi setiap krama deseadat dan tenaga kerja pedesaan. LPD sebagai lembaga keuangan memiliki lapangan usaha yaitu menerima atau menghimpun dana dari Krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito, memberikan pinjaman hanya kepada krama desa, menerima pinjaman dari lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal termasuk cadangan laba

ditahan, menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD Bali dengan imbalan bunga yang bersaing dan pelayanan memadai.

Setiap LPD dikelola oleh sebuah komite (ketua, kasir, dan petugas administrasi). Ketua bertugas mengordinasi kegiatan operasional harian LPD, pembuatan perjanjian kontrak dengan nasabah, bertanggung jawab pada desa adat melalui pemimpinnya (Dewan Pengawas LPD), menyusun rencana kegiatan dan anggaran, dan memformulasikan kebijakan LPD. Petugas administrasi melakukan tugas-tugas administrasi, baik administrasi umum maupun tata buku, bertanggung jawab kepada ketua LPD, menyusun laporan neraca, dan laporan pendapatan, serta mengelola arsip. Sedangkan kasir bertugas mencatat aliran dana. Staff LPD membantu ketua melaksanakan tugasnya dan terlibat dalam pembuatan kegiatan dan rencana anggaran dalam keputusan pemberian kredit. Laporan keuangan yang digunakan LPD meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, *chart of account*.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Berikut hasil dari penelitian sebelumnya :

1. Zahara (2017) meneliti tentang “Pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan (Survei pada Narapidana Tipikor di Lembaga Perumahan Kelas II A Kota Pekanbaru)”. Variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan variabel dependen yaitu tindakan kecurangan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

tekanan tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan, kesempatan dan rasionalisasi berpengaruh signifikan positif terhadap tindakan kecurangan.

2. Chintyana, dkk (2018) meneliti tentang “Pengaruh efektifitas sistem pengendalian internal, keadilan organisasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan daerah air minum (PDAM) kabupaten Buleleng”. Variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu efektifitas sistem pengendalian internal, keadilan organisasi, kesesuaian kompensasi, dan variabel dependen yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas sistem pengendalian internal, keadilan organisasi, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negative terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Irphani, A. (2017) meneliti tentang “Pengaruh tekanan, keefektifan sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan jabatan dalam pengelola keuangan terhadap kecurangan (fraud)”. Variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu tekanan, keefektifan sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, jabatan dalam pengelola keuangan, dan variabel dependen yaitu kecurangan (fraud). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan, keefektifan sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, jabatan dalam pengelola keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap kecurangan (fraud).
4. Ramadhany, dkk (2017) meneliti tentang “Pengaruh sistem pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, dan implementasi good corporate governance terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi”. Variabel

yang diteiti adalah variabel independen yaitu sistem pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, implementasi good corporate governance dan variabel dependen yaitu kecenderungan kecurangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, dan implementasi good corporate governance berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

5. Virmayani, dkk (2017) meneliti tentang “Pengaruh kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, budaya etis organisasi dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (Fraud) akuntansi pada koperasi simpan pinjam se-kecamatan Buleleng”. Variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, budaya etis organisasi, komitmen organisasi, dan variabel dependen yaitu kecurangan akuntansi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi, dan komitmen organisasi berpengaruh negative terhadap kecurangan akuntansi, sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi.
6. Dewi, dkk (2017) meneliti tentang “Pengaruh pengendalian intern kas, moralitas individu, gaya kepemimpinan, dan kepuasan kerja terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan kas (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Buleleng)”. Variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu pengendalian intern kas, moralitas individu, gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan variabel dependen yaitu kecenderungan kecurangan kas. Teknik

analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern kas, moralitas individu, gaya kepemimpinan, dan kepuasan kerja berpengaruh negative terhadap kecenderungan kecurangan kas.

7. Sabila (2019) meneliti tentang “Pengaruh pengendalian internal, kepuasan kerja dan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi pada UMKM kota Semarang”. Variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu pengendalian internal, kepuasan kerja, kesesuaian kompensasi, dan variabel dependen yaitu kecurangan akuntansi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal, kepuasan kerja, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negative terhadap kecurangan akuntansi.
8. Suryandari dan Julianto (2019) meneliti tentang “Pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan efektivitas pengendalian internal terhadap tindak kecurangan (Studi pada LPD Se-Kecamatan Negara)”. Variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, efektivitas pengendalian internal, dan variabel dependen yaitu tindak kecurangan. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tindak kecurangan.
9. Kusuma, dkk (2019) meneliti tentang “Pengaruh pressure, opportunity, rasionalization dan capability terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi”. Variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu pressure, opportunity, rasionalization, capability, dan variabel dependen yaitu kecenderungan

kecurangan. Teknik analisis yang digunakan adalah uji hipotesis dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pressure, opportunity dan capability berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, sedangkan rasionalization tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

10. Nasution dan Marunduri (2020) meneliti tentang “Pengaruh pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan daerah air minum (PDAM) tirta daroy kota Banda Aceh”. Variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan variabel dependen yaitu kecenderungan kecurangan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
11. Anggreni (2020) meneliti tentang “Pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan (Studi pada PT Gieb Indonesia Provinsi Bali)”. Variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan variabel dependen yaitu tindakan kecurangan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan kecurangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan yaitu *fraud triangle*, kesesuaian kompensasi, dan kepuasan kerja sebagai variabel bebas dan tindakan kecurangan sebagai variabel terikat, sedangkan perbedaannya terletak pada populasi, sampel, obyek penelitian dan tahun penelitian.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi cenderung berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Sedangkan kesesuaian kompensasi dan kepuasan kerja cenderung berpengaruh negative terhadap tindakan kecurangan (*fraud*).

